

**PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KECAMATAN DELI TUA
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

**DI SUSUN
OLEH :**

DANARIA TARIGAN
NIM: 13 852 0037



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

**PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KECAMATAN DELI TUA
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

DI SUSUN

OLEH :

DANARIA TARIGAN

NIM: 13 852 0037

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

Judul : Pengaruh Iklan dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Nivea di Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal Medan

Nama Mahasiswa: M. ANSHARI SIBUEA

No. Stambuk : 138320021

Program Studi : Manajemen

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Drs. Patar Marbun, M.Si)

Pembimbing II

(Eka Dewi Setya Tarigan, SE, M.Si)

Mengetahui :

Ketua Program Studi

(Adelina Lubis, SE, M.Si)

Dekan

(Dr. Hisan Effendi, SE, M.Si)

Tanggal Lulus : 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Juli 2017

Danariah Tarigan
NIM. 13 852 0037

ABSTRAK

Danaria Tarigan, Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.

Ketentraman dan Ketertiban masyarakat sangat penting dapat menentukan kelancaran jalannya Pemerintahan, serta pelaksanaan dan pembangunan serta pembinaan ketentraman dalam suatu wilayah daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, hal diatas tidak sesuai dengan keamanan yang ada di Deli Tua. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan belum melihat kinerja yang maksimal dalam program Ketentraman dan Ketertiban masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Persepsi masyarakat dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan mengetahui Faktor- faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban oleh Seksi Tramtib. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang diambil secara *accidental* (kebetulan) dalam kurun waktu 5 hari kerja. Teknik analisa data dilakukan dengan tabel tunggal. Hasil penelitian Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Deli Tua, dimana dari 30 Responden, dimana dengan menyatakan kategori persepsi baik sebanyak 5 responden (16,7%), persepsi cukup baik sebanyak 10 responden (33,3%) menyatakan persepsi cukup baik, dan 15 responden (50,0%) menyatakan kurang baik. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat mengenai pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli Tua Kurang Baik.

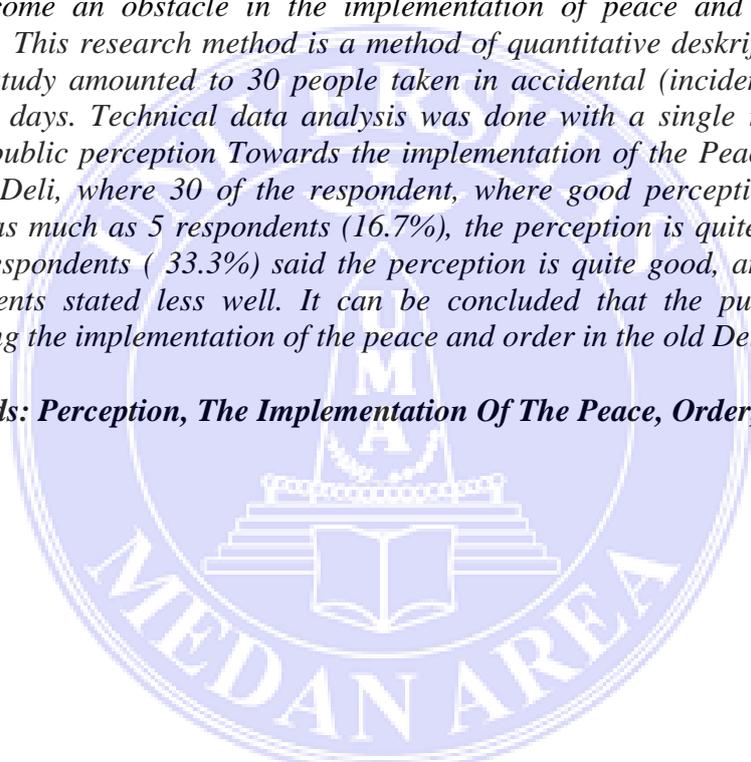
Kata Kunci : Persepsi, Pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban, Kecamatan Deli Tua

ABSTRACT

Danaria Tarigan, *Public Perception In Implementation of Peace and Order In Deli Tua Subdistrict Deli Serdang Regency.*

The peace and order of society is very important and decisive in the smooth running of the Administration, implementation and development and the construction of peace in a region so as to achieve the goal of development that are expected to the welfare of society. However, the above does not correspond to the existing security in an old Deli. Sexy Harmony and order Sub yet to involve the maximum performance in the Peace and order of society. The purpose of this research is to know the perceptions of the community in the implementation of the peace and public order by the Sexy Harmony and order and find out what factors that become an obstacle in the implementation of peace and order by Sexy Tramtib. This research method is a method of quantitative deskriptif. The sample in this study amounted to 30 people taken in accidental (incidentally) within 5 working days. Technical data analysis was done with a single table. Research results public perception Towards the implementation of the Peace and order in the old Deli, where 30 of the respondent, where good perception category by stating as much as 5 respondents (16.7%), the perception is quite good as much as 10 respondents (33.3%) said the perception is quite good, and 15s (50.0%) respondents stated less well. It can be concluded that the public perception regarding the implementation of the peace and order in the old Deli.

Keywords: *Perception, The Implementation Of The Peace, Order, Deli Tua*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya yang berlimpah kepada saya sebagai penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dengan judul **“Persepsi Masyarakat dalam Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang”**.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si selaku Pembimbing I saya dan Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd selaku Pembimbing II saya, yang telah banyak memberi arahan dan dukungan kepada saya dalam proses penyusunan Skripsi ini. Terima kasih juga kepada Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, MPd selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, M.A serta seluruh staff pengajar dan pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan .

Ungkapan terima kasih dan Kado Terindah yang saya persembahkan kepada kedua orang tua yang tercinta yaitu Alm. Bapak Darma Tarigan dan Mamak Persadaan Br Barus dengan penuh pengorbanan membesarkan saya dengan curahan kasih sayang, serta doa yang tak henti kepada saya sampai saat ini sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini. Bagi saya tanpa DOA dari kalian, saya tidak akan mungkin dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Seluruh Teman-Teman Angkatan 2013 yang telah memberikan bantuan dan kepeduliannya selama masih dalam perkuliahan sampai melaksanakan penelitian. Serta ucapan terima kasih kepada Liasta Sembiring yang telah menjadi Motivator saya sampai selesainya skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Publik.

Penulis

(Danaria Tarigan)



DAFTAR ISI

	Halama
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Pembatasan Masalah	3
1.4 Perumusan Masalah.....	4
1.5 Tujuan Penelitian.....	4
1.6 Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI.....	5
2.1 Pengertian Persepsi.....	5
2.2 Pengertian Kebijakan.....	9
2.3 Implementasi Kebijakan	13
2.4 Pengertian Masyarakat	19
2.5 Ketentraman dan Ketertiban.....	20
2.6 Pemerintahan Kecamatan	23
2.7 Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.3 Populasi dan Sampel.....	30
3.3.1. Populasi.....	30

3.3.2. Sampel.....	30
3.4 Instrumen Penelitian.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1.....	
Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
4.1.1.....Sejarah	
Kecamatan.....	33
4.1.2.....Letak	
Demografis.....	34
4.1.3.....Pemerint	
ahan.....	34
4.1.4.....Pendudu	
k.....	36
4.1.5.....Pendidik	
an.....	37
4.1.6.....Kesehata	
n.....	38
4.1.7.....Struktur	
Organisai Kecamatan Deli Serdang.....	40
4.1.8.....Tugas	
Pokok dan Fungsi.....	41
4.2.....	Hasil
Penelitian Penyajian Data.....	44
4.2.1.....	
Karakteritik Responden.....	44
4.2.2.....Persepsi	
Masyarakat	47
4.2.3.....Analisis	
Data Pembahasan	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran.....	61

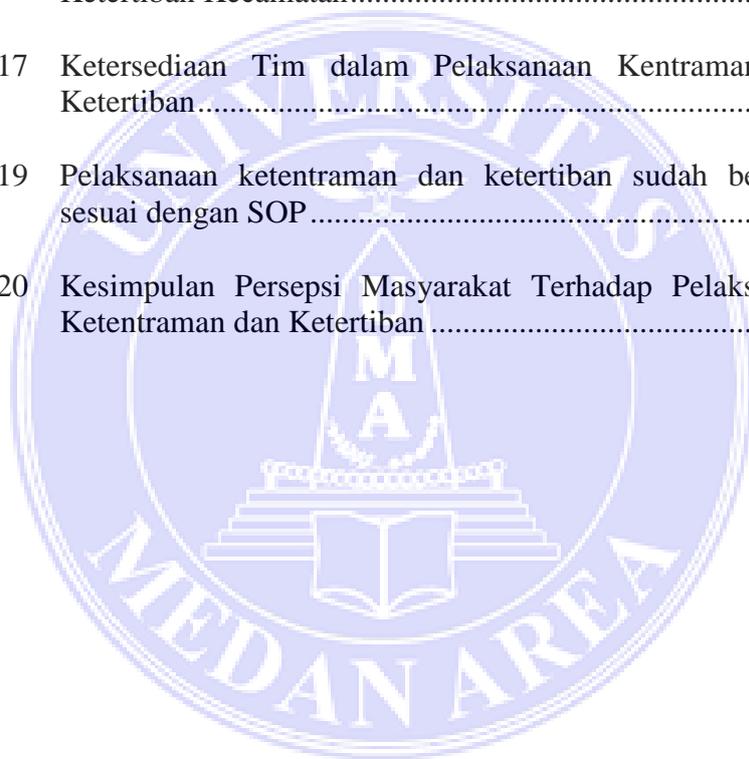
**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

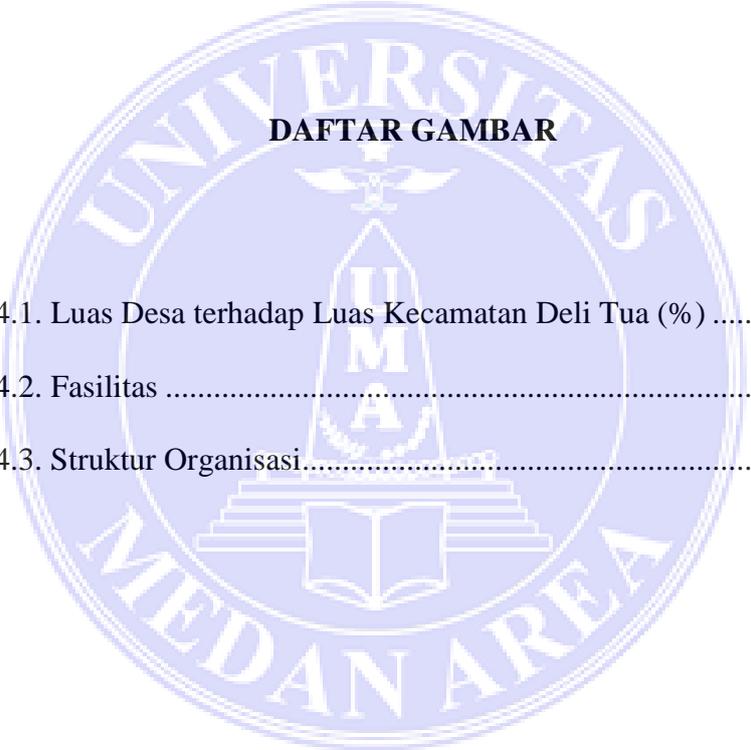


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Pemerintahan Kecamatan Deli Tua	35
Tabel 4.2. Penduduk Kecamatan Deli Tua Berdasarkan Kelompok Umur	36
Tabel 4.3. Penduduk Kecamatan Deli Tua.....	37
Tabel 4.5 Umur	44
Tabel 4.6 Jenis Kelamin.....	45
Tabel 4.7 Pendidikan.....	45
Tabel 4.8 Pekerjaan	46
Tabel 4.9 Mengadakan Penyuluhan atau Sosialisasi Mengenai Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban.....	47
Tabel 4.10 Mengadakan Pelatihan tentang Ketentraman dan Ketertiban untuk mendukung Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban.....	48
Tabel 4.11 Sosialisasi atau Penyebaran Informasi Mengenai Pelaksanaan Ketentraman dan ketertiban	49

Tabel 4.12	Tingkat Pemahaman Tentang Tujuan Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban	50
Tabel 4.13	Jumlah Tenaga (SDM) Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban	51
Tabel 4.14	Keterlibatan Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban.....	52
Tabel 4.15	Ketersediaan Fasilitas Dan Sarana Prasarana Dalam Mendukung Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban	53
Tabel 4.16	Ketersediaan Dana Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan.....	54
Tabel 4.17	Ketersediaan Tim dalam Pelaksanaan Kentraman dan Ketertiban.....	55
Tabel 4.19	Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban sudah berjalan sesuai dengan SOP	56
Tabel 4.20	Kesimpulan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban	57





DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1. Luas Desa terhadap Luas Kecamatan Deli Tua (%)	35
Gambar 4.2. Fasilitas	39
Gambar 4.3. Struktur Organisasi.....	40

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya yang berlimpah kepada saya sebagai penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dengan judul **“Persepsi Masyarakat dalam Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang”**.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si selaku Pembimbing I saya dan Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd selaku Pembimbing II saya, yang telah banyak memberi arahan dan dukungan kepada saya dalam proses penyusunan Skripsi ini. Terima kasih juga kepada Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, MPd selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, M.A serta seluruh staff pengajar dan pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan .

Ungkapan terima kasih dan Kado Terindah yang saya persembahkan kepada kedua orang tua yang tercinta yaitu Alm. Bapak Darma Tarigan dan Mamak Persadaan Br Barus dengan penuh pengorbanan membesarkan saya dengan curahan kasih sayang, serta doa yang tak henti kepada saya sampai saat ini sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini. Bagi saya tanpa DOA dari kalian, saya tidak akan mungkin dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Seluruh Teman-Teman Angkatan 2013 yang telah memberikan bantuan dan kepeduliannya selama masih dalam perkuliahan sampai melaksanakan penelitian. Serta ucapan terima kasih kepada Liasta Sembiring yang telah menjadi Motivator saya sampai selesainya skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Publik.

Penulis

(Danaria Tarigan)



DAFTAR ISI

Halama

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Pembatasan Masalah	3
1.4 Perumusan Masalah.....	4
1.5 Tujuan Penelitian.....	4
1.6 Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI.....	5
2.1 Pengertian Persepsi.....	5
2.2 Pengertian Kebijakan.....	9
2.3 Implementasi Kebijakan	13
2.4 Pengertian Masyarakat	19
2.5 Ketentraman dan Ketertiban.....	20
2.6 Pemerintahan Kecamatan	23
2.7 Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.3 Populasi dan Sampel.....	30
3.3.1. Populasi.....	30

3.3.2. Sampel.....	30
3.4 Instrumen Penelitian.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1.....	
Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
4.1.1.....Sejarah	
Kecamatan.....	33
4.1.2.....Letak	
Demografis.....	34
4.1.3.....Pemerint	
ahan.....	34
4.1.4.....Pendudu	
k.....	36
4.1.5.....Pendidik	
an.....	37
4.1.6.....Kesehata	
n.....	38
4.1.7.....Struktur	
Organisai Kecamatan Deli Serdang.....	40
4.1.8.....Tugas	
Pokok dan Fungsi.....	41
4.2.....	Hasil
Penelitian Penyajian Data.....	44
4.2.1.....	
Karakteritik Responden.....	44
4.2.2.....Persepsi	
Masyarakat	47
4.2.3.....Analisis	
Data Pembahasan	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran.....	61

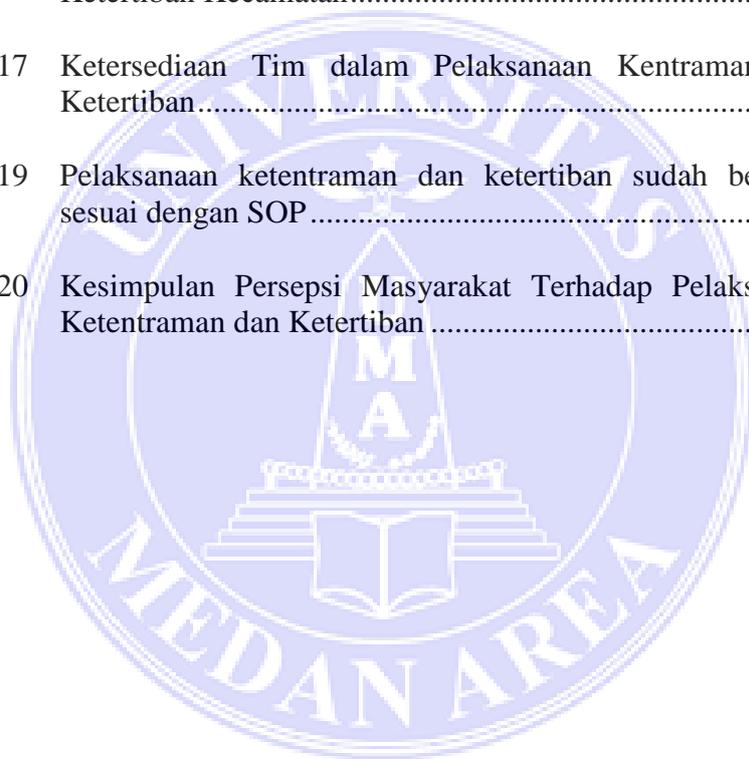
**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

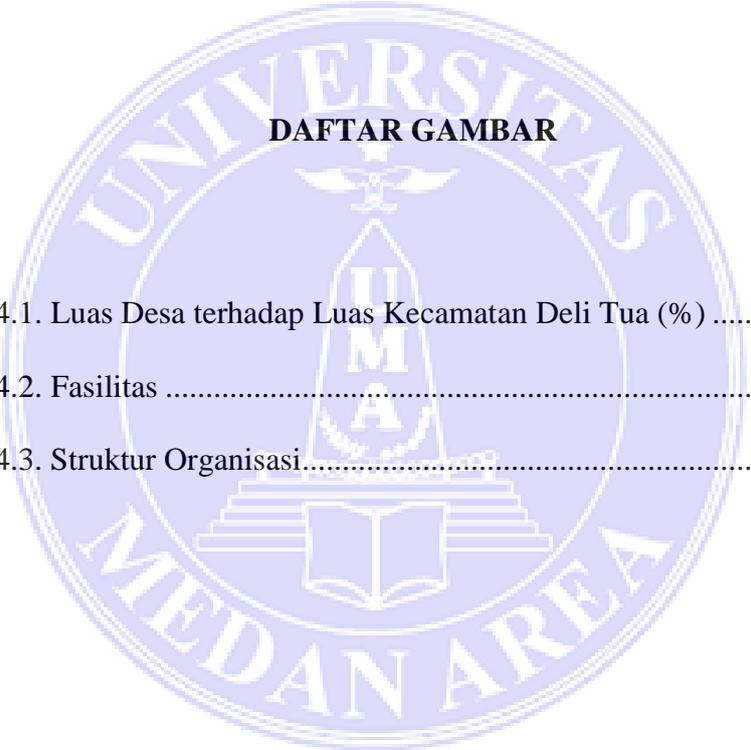


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Pemerintahan Kecamatan Deli Tua	35
Tabel 4.2. Penduduk Kecamatan Deli Tua Berdasarkan Kelompok Umur	36
Tabel 4.3. Penduduk Kecamatan Deli Tua.....	37
Tabel 4.5 Umur	44
Tabel 4.6 Jenis Kelamin.....	45
Tabel 4.7 Pendidikan.....	45
Tabel 4.8 Pekerjaan	46
Tabel 4.9 Mengadakan Penyuluhan atau Sosialisasi Mengenai Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban.....	47
Tabel 4.10 Mengadakan Pelatihan tentang Ketentraman dan Ketertiban untuk mendukung Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban.....	48
Tabel 4.11 Sosialisasi atau Penyebaran Informasi Mengenai Pelaksanaan Ketentraman dan ketertiban	49

Tabel 4.12	Tingkat Pemahaman Tentang Tujuan Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban	50
Tabel 4.13	Jumlah Tenaga (SDM) Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban	51
Tabel 4.14	Keterlibatan Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban.....	52
Tabel 4.15	Ketersediaan Fasilitas Dan Sarana Prasarana Dalam Mendukung Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban	53
Tabel 4.16	Ketersediaan Dana Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan.....	54
Tabel 4.17	Ketersediaan Tim dalam Pelaksanaan Kentraman dan Ketertiban.....	55
Tabel 4.19	Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban sudah berjalan sesuai dengan SOP	56
Tabel 4.20	Kesimpulan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban	57





DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1. Luas Desa terhadap Luas Kecamatan Deli Tua (%)	35
Gambar 4.2. Fasilitas	39
Gambar 4.3. Struktur Organisasi.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecamatan adalah sebuah pembagian Administratif Negara Indonesia di bawah Wilayah Tingkat II Kabupaten/Kota, serta terdiri dari beberapa kelurahan atau desa lainnya. Sebuah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati atau Wali kota melalui perantaraan seorang Sekretaris Daerah. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kabupaten/Kota. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat.

Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan. Hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan. Camat juga mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretariat Daerah. Tugas-tugas umum pemerintah yang diselenggarakan oleh Camat di Kecamatan seperti mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dimasyarakat.

Tugas menjaga ketentraman dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen masyarakat. Secara umum tugas keamanan tersebut

dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Undang-Undang ketentraman dan ketertiban juga harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan. Dalam upaya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan tugas Seksi ketentraman dan ketertiban (seksi tramtib). Lingkup tugas dan kewenangan Seksi ketentraman dan ketertiban dalam unsur Pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi penegakkan dan pembinaan hukum terhadap peraturan Pemerintah Daerah (Perda) yang berlaku di setiap daerah pemerintahan.

Keadaan tatanan sosial yang seimbang akan menciptakan suasana aman dan tertib yang merupakan jaminan terpenuhinya segala kebutuhan manusia, sehingga masyarakat membutuhkan perhatian yang khusus dari Pemerintah Kecamatan agar terjaminnya ketentraman dan ketertiban khususnya di Kelurahan Deli Tua Timur. Dimana kurang amannya masyarakat sebab sering terjadi pada tindakan pencurian yang membuat masyarakat merasa tidak aman di rumah. Perlindungan dari Pemerintah Kecamatan sangat dibutuhkan demi terciptanya keadaan yang tentram dan aman dalam hidup bermasyarakat sesuai dengan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Ketentraman dan Ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya Pemerintahan, pelaksanaan dan pembangunan serta pembinaan ketentraman dalam suatu wilayah daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, hal diatas tidak sesuai dengan keamanan yang ada di Deli Tua. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan belum melihatkan kinerja yang maksimal dalam program Ketentraman dan Ketertiban masyarakat. Hal tersebut terlihat dengan

fenomena-fenomena sosial yang menyebabkan tidak tentram dan tertibnya Kecamatan Deli Tua. Adapun fenomena-fenomena sosial tersebut seperti pencurian, pembunuhan, kenakalan remaja, hiburan yang tidak memiliki izin (lapo tuak, oukup, dll) dan ketertiban Pasar Deli Tua dimana banyak pedagang yang mengganggu fasilitas jalan sehingga mengakibatkan kemacetan. Hal tersebut sesuai dengan survei awal dengan Sekretaris Camat dan beberapa masyarakat. Fenomena-fenomena tersebut jelaskan melihatkan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli Tua masih dapat dikatakan kurang tentram dan tertib. Berdasarkan hal diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli tua Kabupaten Deli Serdang”.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis dapat uraikan beberapa identifikasi permasalahan yang ada yaitu :

1. Mengetahui berjalan atau tidaknya pelaksanaan Tupoksi Kecamatan dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.
2. Persepsi masyarakat dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kelurahan Deli Tua Timur Kecamatan Deli Tua.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas perlu dilakukan pembatasan masalah untuk menghindari meluasnya penafsiran dalam penelitian. Sehingga dalam permasalahan ini peneliti hanya memfokuskan pada Persepsi Masyarakat

dalam Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Deli Tua dengan pengambilan sampel di Kelurahan Deli Tua Timur dengan kasus mengenai:

1. Ketentraman : Pencurian
2. Ketertiban : Pedagang yang mengganggu fasilitas jalan

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Persepsi masyarakat dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang ?
2. Faktor- faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban oleh Seksi Ketentaman dan Ketertiban Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang ?

1.5. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui Persepsi masyarakat dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban oleh Seksi Ketentaman dan Ketertiban
2. Untuk mengetahui Faktor- faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban oleh Seksi Ketentaman dan Ketertiban.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan diharapkan dapat berguna memberikan manfaat-manfaat yang berguna seperti :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian bermanfaat secara teoritis yaitu melalui sumbangan teori dan untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Dengan harapan hasil penelitian ini mampu memperkaya kajian Administrasi Publik khususnya dalam pelayanan publik kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Medan Area penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajian mahasiswa.
- b. Bagi Kantor Camat Delitua penelitian ini diharapkan menjadi suatu gambaran nyata untuk penyempurnaan kedepannya dalam melayani masyarakat.
- c. Bagi Peneliti Sendiri untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan perkuliahan di Program Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Persepsi

Istilah persepsi diartikan sebagai pendapat, pandangan seseorang atau kelompok manusia, dan sebagainya. Namun sebenarnya istilah persepsi memiliki pengertian yang lebih mendalam adalah suatu penglihatan atau gambaran terhadap sesuatu yang dilakukan seseorang atau kelompok. Keadaan individu yang dapat mempengaruhi hasil persepsi datang dari dua sumber yaitu berhubungan dengan segi kejasmanian, dan yang berhubungan dengan segi psikologi. Bila sistem fisiologinya terganggu hal tersebut akan berpengaruh dalam persepsi seseorang.

Segi psikologi yang telah dipaparkan diatas yaitu pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan motivasi akan berpengaruh pada seseorang. Dalam mengadakan segi psikologi yang telah dipaparkan diatas yaitu pengalaman, perasaan, kemampuan berfikir, kerangka acuan, dan motivasi akan berpengaruh pada seseorang dalam mengadakan persepsi. Sedangkan lingkungan atau situasi yang melatar belakangi stimulus juga kan berpengaruh dalam persepsi lebih-lebih bila objek merupakan kebetulan atau kesatuan yang sulit dipisahkan. Objek yang sama dengan situasi yang sama dengan situasi sosial yang berbeda dapat menghasilkan persepsi yang berbeda.

Menurut Thoha (1998 : 23) persepsi adalah proses kognitif yang dialami penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Persepsi merupakan penafsiran yang unik terhadap situasi. Yang dimaksud dengan kognitif diatas adalah proses atau kegiatan mental yang sadar seperti berpikir,

mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental seperti sikap, kepercayaan, dan penghargaan yang kesemuanya faktor yang menentukan perilaku.

Sedangkan menurut Laura A. King (2014: 225) “menyatakan bahwa:

Persepsi adalah proses mengorganisir dan menginterpretasi informasi sensori untuk memberikan makna”. Apa yang kita persepsikan tergantung dari sebagian pada rangsangan mana yang terlibat dalam atensi kita, dan pada kecenderungan kita mempersepsi berbagai hal menurut keyakinan dan pengharapan kita.

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului penginderaan yaitu proses stimulus oleh individu melalui proses sensoris” (Bimo Walgito, 2002: 87). Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan diproses selanjutnya merupakan proses persepsi. Persepsi dapat disimpulkan merupakan suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian di interpretasikan sehingga individu dapat memberikan pandangan, memahami dan dapat mengartikan tentang stimulus yang tidak lepas dari kegiatan berpersepsi. Hampir setiap hari manusia berpersepsi ketika berkomunikasi.

Dedi Mulyana (2005: 171) menyatakan bahwa secara garis besar persepsi manusia dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) sifat-sifat luar, sedangkan persepsi terhadap orang menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, harapan, dan sebagainya). Orang akan mempersepsi anda pada saat anda mempersepsi mereka. Dengan kata lain, persepsi terhadap manusia bersifat interaktif.

- b. Persepsi terhadap manusia melalui lambing-lambang fisik, sedangkan persepsi terhadap orang melalui lambang-lambang verbal dan nonverbal. Orang lebih aktif dari pada kebanyakan obyek dan lebih sulit diramalkan.

Adapun Menurut Jalaludin Rakhmat (2011: 51) “Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi sebagai berikut (Jalaludin Rakhmat, 2011: 54) yaitu:

a. Faktor-faktor fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal.

Krech dan Crutchfield (Jalaludin Rakhmat, 2011: 55) merumuskan dalil persepsi bersifat selektif secara fungsional. Dalil ini berarti bahwa objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.

b. Faktor-faktor struktural

Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi berasal dari luar individu, seperti lingkungan, budaya, hukum yang berlaku, nilai-nilai dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu.

Bila objek atau peristiwa di dunia luar kita sebut *distal stimuli* dan persepsi kita tentang stimuli itu kita sebut *percept* maka *percept* tidak selalu sama dengan *distal stimuli*. Proses subjektif yang secara aktif menafsirkan stimuli disebut Fritz

Heider sebagai *constructive process*. Proses ini meliputi faktor biologis dan sosiopsikologis individu pelaku persepsi.

Lahirilah istilah persepsi sosial yang didefinisikan sebagai “*the role of socially generated influences on the basic processes of perception*” (Mc David dan Harari, 1968: 173). Persepsi sosial kini memperoleh konotasi baru sebagai proses mempersepsi objek-objek dan peristiwa-peristiwa sosial. Untuk tidak mengaburkan istilah dan untuk menggaris bawahi manusia (dan bukan benda) sebagai objek persepsi, disini kita menggunakan istilah persepsi interpersonal. Persepsi pada objek selain manusia kita sebut saja persepsi objek.

Faktor faktor yang mempengaruhi persepsi antar satu orang dengan orang lain, atau antara satu kelompok dengan kelompok lain adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan

Pengetahuan terhadap objek yang diamati sangat diperlukan. Tingkat pengetahuan sangat dipengaruhi oleh latar belakang tingkat pendidikannya, semakin tinggi pengetahuan seseorang terhadap sesuatu objek, maka semakin baik pula persepsinya terhadap objek tersebut, karena cara berfikir dan menganalisisnya tidak hanya terpaku pada apa yang ada dalam objek tersebut, tetapi akan dikaitkan dengan hal-hal yang diperkirakan mempunyai persepsi yang baik bagi dirinya maupun lingkungannya.

2. Sistem Nilai

Sistem turut mempengaruhi seseorang untuk berpersepsi, oleh karena itu suatu sistem nilai yang melekat dalam diri seseorang menyebabkan aktivitasnya dipengaruhi oleh sistem tersebut. Nilai-nilai yang tertanam

pada seseorang oleh lingkungan yang membentuknya seperti hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk, yang pantas atau hal-hal yang tidak pantas dilakukan akan membentuk cara pandang, sikap hidup yang dapat dipegang teguh terbentuknya sistem nilai itu.

3. Cara Berfikir

Persepsi dapat pula dipengaruhi oleh wawasan pemikiran terhadap objek yang diamati serta manfaat objek tersebut pada masa masa yang akan datang. Sejauh mana pandangan objek bermanfaat bagi diri dan lingkungannya, maka persepsi akan menjadi lebih baik.

4. Kebutuhan

Kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut dengan demikian, kebutuhan kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi.

5. Perhatian

Perhatian adalah kemampuan seseorang didalam memandang suatu objek, Hal itu dipengaruhi oleh faktor faktor situasional dan personal. Faktor situasional merupakan faktor determinan bersifat eksternal.

2.2. Pengertian Kebijakan

Konsep dasar tentang kebijakan publik sebenarnya bermula dari bangsa Yunani dan Romawi yang mengambil konsep *public* dan *privat*. Bangsa Romawi mendefinisikan kedua istilah tersebut dalam *term res publica* dan *res priva*. Gagasan publik dan privat pada masa Yunani kuno diekspresikan dalam istilah *konion* (yang dapat diartikan publik) dan *idion* (yang bisa diartikan privat).

Kemudian sejarah studi kebijakan publik sudah dapat dirasakan keberadaannya sejak abad ke 18 SM pada masa pemerintahan Babilonia yang disebut dengan Kode Hammurabi. Kode ini mengekspresikan keinginan membentuk ketertiban publik yang bersatu dan adil pada masa ketika Babilonia mengalami transisi dari Negara kota kecil menjadi wilayah yang luas (Fermana, 2009 : 30-31).

Istilah “Kebijakan” dan “Publik” dalam Kebijakan Publik dapat disimak melalui beberapa definisi tentang kebijakan publik yang dikumpulkan dari berbagai macam literatur. Pendefinisian berguna untuk menyediakan informasi bagi para perumus dan penganalisis kebijakan publik dikemudian hari manakala mereka berdiskusi dalam ruang politis (Nawawi, 2009 : 7). Sedangkan menurut Nugroho (2003) dalam (Nugroho, 2014 : 105), kebijakan publik tidak pernah muncul di “ruangan khusus”. Kebijakan publik sebagai studi bagaimana, mengapa dan apa efek dari tindakan aktif (action) dan pasif (inaction) pemerintah atau kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut (Fermana, 2009 : 34).

Furlong (2005) seperti yang dikutip oleh Nugroho (2014 : 105) yang berpendapat bahwa:

“Kebijakan publik tidak dibuat dalam keadaan vakum. Kebijakan publik dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, nilai politik yang berlaku dan suasana hati masyarakat pada suatu waktu, struktur pemerintahan, norma nasional serta norma budaya local, merupakan variabel yang lain.”

Pandangan berbeda disampaikan oleh Thoha (2008 : 106-107) terkait *policy* yang menyimpulkan bahwa *policy* di satu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak

policy merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif. William N. Dunn (1994), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain. Dan Pasolong (2010 : 39) mengartikan kebijakan publik ke dalam beberapa poin yaitu:

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik.
3. Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan 10 publik.

Dye dalam Anshori et al. (2012 : 75) mendefenisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (*what government do, why they do it, and what difference it makes*). Dan output dari hubungan yang saling mempengaruhi dalam proses politik dalam institusi demokrasi; antara legislatif; eksekutif; peradilan; dan pemerintah nasional serta daerah; akan menjadi kebijakan publik Namun untuk memahami berbagai defenisi kebijakan publik, ada baiknya jika membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik seperti yang diutarakan oleh Young dan Quinn (2002) dalam Suharto (2005 : 44- 45) yaitu:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang mewakili kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkat kegiatan yang berorientasi kepada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan 11 dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah. Intinya dari semua pengertian tentang kebijakan publik, apapun bentuknya, merupakan suatu landasan hukum yang sah bagi Pemerintah untuk mengambil tindakan.

2.3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama Pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa:

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. Teori George C. Edward Edward III dalam Subarsono, (2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
 - a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
 - b. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber

daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta 13 keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal

terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi Pemerintah.

2. Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi menurut Merilee S.

Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan

- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. (Siapa) pelaksana program
- f. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

- 3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).
- 4. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Menurut pandangan Edward III (Budi

Winarno, 2008: 175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu

- a. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b. Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.
- c. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Penelitian ini menggunakan teori dari Edward III yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi 4 faktor oleh dua variabel besar, yakni Struktur Birokrasi, Disposisi, Sumberdaya, dan Komunikasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban secara lebih mendalam.

2.4. Pengertian Masyarakat

Masyarakat terdiri dari beberapa orang, dan bersatu menjadi suatu sekumpulan yang hidupnya saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya masyarakat yang luas maka akan membentuk suatu negara. Masyarakat menurut Koentjaraningrat (2009:116) “menyatakan bahwa Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul” atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi. Negara modern misalnya, merupakan kesatuan manusia dengan berbagai macam prasarana, yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi secara intensif dan dengan frekuensi yang tinggi. Untuk sekumpulan manusia itu kita pakai istilah kerumunan. Didalam bahasa inggris telah dipakai istilah *crowd*.

Ada pun menurut J.L. Gilin dan J.P.Gilin dalam buku mereka *Cultural Sociology* (1954:139) yang merumuskan bahwa masyarakat atau *society* adalah “*the largest grouping in which common customs, traditions, attitudes and feelings of unity are operative*” . Unsur *grouping* dalam defenisi itu menyerupai unsur “kesatuan hidup” dalam defensi kita, unsur *common customs* dan *traditions* adalah unsur “adat istiadat” dan “kontinuitas” dalam defenisi kita, serta unsur *common attitudes and feelings uf unity* sama dengan unsur “identitas bersama”.

Menurut Djojodinegoro ini dapat dikatakan masyarakat indonesia sebagai contoh suatu”masyarakat dalam arti luas”. Sebaliknya, masyarakat yang terdiri dari warga suatu kelompok kekerabatan seperti dadia, marga, atau suku, kita anggap sebagai contoh dari suatu “masyarakat dalam arti sempit”. Kesatuan wilayah, kesatuan adat-istiadat, rasa identitas komunitas, dan rasa loyalitas

terhadap komunitas sendiri, merupakan ciri-ciri suatu komunitas, dan pangkal dari perasaan seperti patriotisme, nasionalisme dan sebagainya, yang biasanya bersangkutan dengan negara.

Masyarakat menurut Paul B harton dalam Soekanto (2002:24) “masyarakat adalah sekumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tertentu”.

Dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Setiap orang melihat, mempergunakan, bahkan kadang-kadang merusak kebudayaan. “masyarakat adalah orang atau manusia yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, keduanya tak dapat dipisahkan dan selamanya merupakan dwitunggal” (Jacobus Ranjabar 2013: 28).

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan beberapa orang yang tinggal dalam suatu tempat yang hidupnya saling bergantung dengan yang lain, masyarakat hidup bersamaan dan terdiri dari beberapa budaya dan memiliki hak yang sama.

2.5. Ketentraman dan Ketertiban

Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta adalah :

“Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.”

Berdasarkan kedua pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tenang.

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain mendefinisikan bahwa :

“Ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan”.

Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

Selanjutnya pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, mendefinisikan bahwa :

“Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang Ekonomi dan Keuangan”.

Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum didalam undang-undang No.12 Tahun 2008 pasal 13 Ayat (1) huruf C dikatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”.

Definisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan pengertian dalam masyarakat, menurut W.J.S Paerwadarminta adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu).”

Jadi dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: Ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan / kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, bahwa ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya :

- a. Pelanggaran hukum yang berlaku
- b. Bencana-bencana, baik bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisme lainnya.
- c. Faktor Bidang Ekonomi dan Keuangan.

2.6. Pemerintahan Kecamatan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat. Jadi, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan Pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Selanjutnya Kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah (Perda) , dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Namun Rancangan Perda tentang pembentukan Kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan.

1. Kedudukan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah
- b. sekretariat DPRD
- c. inspektorat
- d. dinas
- e. badan
- f. Kecamatan

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

2. Pembentukan Kecamatan

Pembentukan Kecamatan diatur pada pasal 222 UU No.23 Tahun 2014:

- a) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 221 ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- b) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Jumlah penduduk minimal
 2. Luas wilayah minimal
 3. Jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan
 4. Usia minimal Kecamatan.
 5. Persyaratan teknis

3. Klasifikasi Kecamatan

Klasifikasi Kecamatan diatur pada Pasal 223 UU No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar
- b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/Kelurahan. Perbedaan klasifikasi kecamatan kalau menurut UU Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian diatur di dalam PP No 19 Tahun 2008. Struktur Organisasi Kecamatan bisa berpola maksimal dengan 5 Kepala Seksi dan bisa berpola minimal dengan 3 Kepala Seksi. Untuk sekarang ini Kecamatan diatur dengan klasifikasi Tipe A

(Kecamatan yang beban kerjanya besar) dan klasifikasi Tipe B (Kecamatan dengan beban kerja yang kecil).

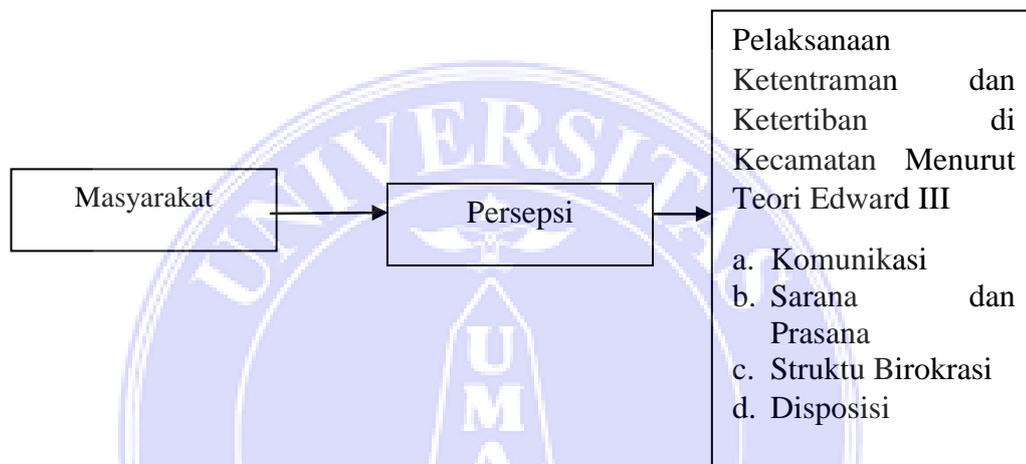
4. Camat

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Camat adalah seorang pemimpin dalam Kecamatan yang didalam pelaksanaan tugasnya memperoleh limpahan sebagai wewenang Bupati dan wilayah untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah. Seperti diketahui, pentingnya seorang Camat adalah sebagai pemimpin, memiliki tugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Camat sebagai kepala wilayah Kecamatan mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum.
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di Kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa/ Kelurahan.
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.7. Kerangka Berpikir

Persepsi merupakan suatu pernyataan atau tanggapan atas hal yang dirasakan. Hal tersebut pula sebagai pemicu suatu pemerintahan untuk mengembangkan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Lebih menjadi lebih baik lagi. Berikut dapat kita lihat dari gambar 1 tersebut merupakan skema dari kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa. Tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesa atau membuat prediksi. Metode deskriptif bertujuan untuk melukiskan secara sistematis karakteristik populasi atau bidang-bidang tertentu secara faktual dan cermat tanpa mencari atau menjelaskan suatu hubungan (Sugiyono, 2011:27).

Metode deskriptif ialah pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2001:63). Ciri-ciri pokok metode deskriptif adalah :

- a. Memutuskan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada penelitian, dilakukan saat sekarang atau ada masalah-masalah yang bersifat aktual.
- b. Menggunakan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Camat Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, Jalan Deli Tua Biru-Biru no 34 Deli Tua. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada Maret sampai dengan April 2017.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:90). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang mengetahui pelaksanaan Camat dalam ketentraman dan ketertiban (tramtib) melihat besarnya jumlah masyarakat kecamatan Deli Tua, dan tidak semua masyarakat yang mengetahui pelaksanaan ketentraman dan ketertiban (tramtib), maka sampel penelitian ini hanya masyarakat yang mengetahui pelaksanaan.

3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2011:91).

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang masyarakat yang mengetahui pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli Tua dan diambil secara *accidental* (kebetulan) dalam kurun waktu 5 hari kerja.

3.4. Instrumen Penelitian

Konsep merupakan istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian (Singarimbun, 2006:33). Variabel dalam penelitian ini merupakan variabel tunggal (satu), untuk melihat persepsi dalam pelaksanaan,

penulis mengemukakan defenisi dari konsep yang dipergunakan, yaitu pelaksanaan atau Implementasi menurut Teori Edward III dengan 4 indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, birokrasi dan disposisi.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang mendukung tujuan penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Pengumpulan Data Primer, yaitu :

- a. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan yang dilengkapi dengan alternatif jawaban yang tersedia dalam bentuk angket kepada responden.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait.
- c. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder, yaitu :

- a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono (2010: 335) teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Untuk keperluan analisis data, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan (Moleong, 2010: 4).

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyelesaikan dengan melalui beberapa tahapan pengolahan data, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama penulis mengadakan penelitian dengan menyebar angket kepada masyarakat yang mengetahui pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli Tua. Setelah data terkumpul peneliti mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin, dan mengelompokkan lagi berdasarkan daftar pertanyaan yang ada di angket. Kemudian mengolahnya serta menganalisis sehingga dapat diambil suatu kesimpulan menggunakan tabel tunggal.
2. Data yang telah dikumpulkan agar mudah dianalisis dan disimpulkan maka penulis menggunakan analisis yang menghasilkan deskriptif analisis.
3. Proses analisis data menggunakan pola berfikir induktif yaitu proses pengolahan data dari hal-hal yang khusus dan diperoleh dari responden kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fermana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- King, Laura. 2014. *Psikologi umum*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mariun. 1979. *Azas-azas Ilmu Pemerintah*. Yogyakarta: Seksi Penerbitan UGM, Yogyakarta.
- Milles and Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung .
- Mulyana, Dedi. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy*. Surabaya: PMN.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*. Jakarta: Pustaka belajar.
- Rackhmat, Jalaludin. 2011. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Remaja Rosdakarya.
- Ranjabar, Jacobus. 2013. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Ritonga, Syafruddin. 2013. *Human Relations*. Medan: Medan Area University Press.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei* . Jakarta: LP3ES.
- Soekanto. 2002. *Sosiologi*. Jakarta: Raja Persada.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik “Konsep, Teori, dan Aplikasi”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, Miftah. 2011. *Ilmu Administrasi Publik dan Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Walgito, Bimo. 2002. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.

Wibawa, Samodra. dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.

B. Dokumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah.

C. Jurnal

Bahar, Hardiyanti. 2016. *Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Studi di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Vol.III nomor 2, Juni 2016. (<http://ojs.unm.ac.id/index.php/tomalebbi/article/view/2046>), diakses 1 Maret 2017)

D. Internet

<https://suparman11.wordpress.com/2013/11/17/kelas-sosial-dalam-masyarakat/>

<http://ringkasteori.blogspot.co.id/2012/06/ketertiban-dan-ketentraman-masyarakat.html>

<http://eprints.uny.ac.id/8628/3/bab%20-%20-%2008417141012.pdf>

<http://dianchocho.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-fungsi-dan-asas-pemerintahan.html>

KUESIONER PENELITIAN

**PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI
KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN
DELI SERDANG**

Pengantar: Penelitian ini dilakukan dalam rangka tugas akhir penyusunan skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Medan Area. Informan dimohon untuk memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan. Kesungguhan informan dalam memberikan jawaban akan mempengaruhi kualitas hasil penelitian.

Petunjuk: Informan dimohon memberikan jawaban dengan melingkari salah satu jawaban yang informan anggap benar untuk mewakili jawaban informan.

Identitas Informan:

Umur : Tahun

Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

Alamat Desa/Kelurahan : Kelurahan Deli Tua Timur

Pendidikan Terakhir :

- | | |
|------------|---------------|
| 1. SD | 2. SLTP |
| 3. SLTA | 4. D1/D2/D3 |
| 5. S-1 | 6. S-2 Keatas |
| 7. Lainnya | |

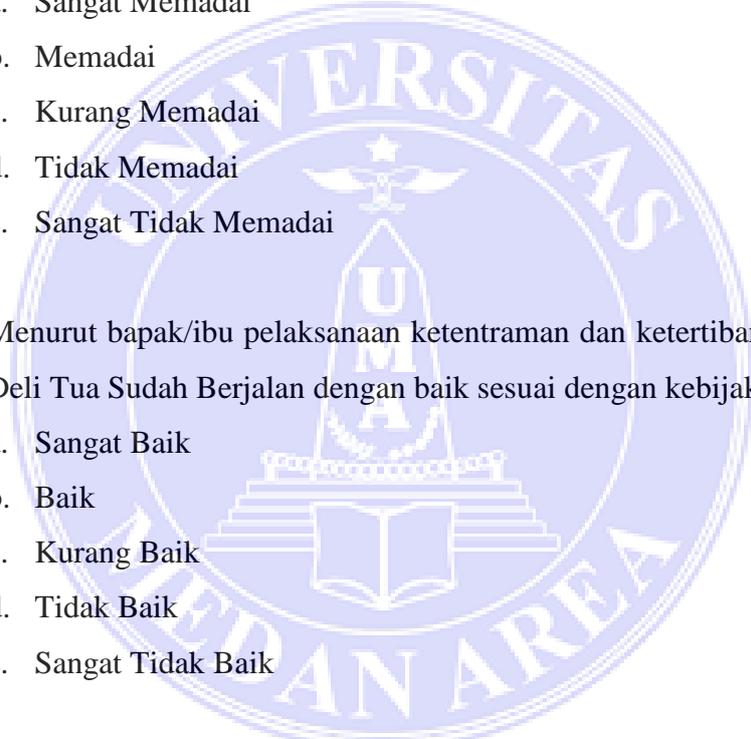
Pekerjaan :

1. PNS/TNI/POLRI
2. Pegawai Swasta
3. Wiraswasta/Usahawan
4. Mahasiswa
5. Lainnya

Pertanyaan Persepsi

1. Kecamatan Deli Tua mengadakan penyuluhan/sosialisasi mengenai pelaksanaan ketentraman dan ketertiban?
 - a. Sangat Sering
 - b. Sering
 - c. Cukup Sering
 - d. Kadang-Kdang
 - e. Tidak Pernah
2. Kecamatan Deli Tua mengadakan pelatihan tentang Ketentraman dan Ketertiban untuk mendukung pelaksanaan ketentraman dan ketertiban ?
 - a. Sangat Sering
 - b. Sering
 - c. Cukup
 - d. Kadang-Kadang
 - e. Tidak Pernah
3. Sosialisasi atau penyebaran informasi mengenai pelaksanaan ketentraman dan ketertiban disampaiakn kecamatan sudah baik?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Kurang
 - d. Tidak Baik
 - e. Sangat Tidak Baik

4. Tingkat Pemahaman bapak/ibu tentang tujuan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli Tua?
 - a. Sangat Paham
 - b. Paham
 - c. Kurang Paham
 - d. Tidak Paham
 - e. Sangat Tidak Paham
5. Menurut bapak ibu jumlah tenaga (SDM) dalama pelaksanaan ketentraman dan ketertiaban di Kecamatan Deli Tua
 - a. Sangat Memadai
 - b. Memadai
 - c. Kurang Memadai
 - d. Tidak Memadai
 - e. Sangat Tidak Memadai
6. Keterlibatan Bapak/ibu dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli tua
 - a. Sangat Terlibat
 - b. Terlibat
 - c. Kurang Terlibat
 - d. Tidak Terlibat
 - e. Sangat Tidak Terlibat
7. Menurut bapak/ibu ketersediaan fasilitas dan sarana prasanada dalam mendukung pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli Tua?
 - a. Sangat Memadai
 - b. Memadai
 - c. Kurang Memadai
 - d. Tidak Memadai
 - e. Sangat Tidak Memadai

8. Menurut bapak/ibu ketersediaan dana dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli Tua?
 - a. Sangat Memadai
 - b. Memadai
 - c. Kurang Memadai
 - d. Tidak Memadai
 - e. Sangat Tidak Memadai
 9. Menurut bapak ibu ketersediaan tim dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli Tua?
 - a. Sangat Memadai
 - b. Memadai
 - c. Kurang Memadai
 - d. Tidak Memadai
 - e. Sangat Tidak Memadai
 10. Menurut bapak/ibu pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli Tua Sudah Berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan atau SOP?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Kurang Baik
 - d. Tidak Baik
 - e. Sangat Tidak Baik
- 

Saran Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Delitua :

Sekian dan Terima Kasih

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1
Memberikan Angket dan Wawancara bersama Bapak Sudarso
(Kepala Lurah Deli Tua Timur) Pada Kamis 11 Mei 2017



Gambar 2
Memberikan angket kepada Masyarakat Kelurahan Deli Tua Timur
Pada Kamis 11 Mei 2017



Gambar 3
Memberikan angket kepada Masyarakat Kelurahan Deli Tua Timur
Pada Senin 15 Mei 2017



Gambar 4
Memberikan angket kepada Masyarakat Kelurahan Deli Tua Timur
Pada Senin 15 Mei 2017



Gambar 5
Memberikan angket kepada masyarakat Kelurahan Deli Tua Timur
Pada Senin 15 Mei 2017



Gambar 6
Memberikan angket kepada Masyarakat Kelurahan Deli Tua Timur
Pada Senin 15 Mei 2017



Gambar 7
Wawancara dengan Bapak Irwan Dermawan SMHK
(Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kantor Camat Deli Tua) Pada
Kamis 11 Mei 2017



Gambar 8
Wawancara dan Meminta Data kepada Mhd. Faisal Nasution, SSTP,MAP
(Sekretaris Camat di Kecamatan Deli Tua)